

**PERAN POLITIK MOHAMMAD HATTA DALAM SISTEM  
DEMOKRASI PARLEMENTER PADA TAHUN 1950-1957**

**SKRIPSI**



**Oleh**

**Khoeruddin Nur Rochman**

**1501075009**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA  
2019**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : Peran Politik Mohammad Hatta Dalam Sistem Demokrasi  
Parlemerter Pada Tahun 1950-1957

Nama : Khoeruddin Nur Rochman

NIM : 1501075009

Setelah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi, dan direvisi sesuai saran penguji

Program Studi : Pendidikan Sejarah

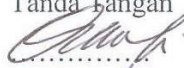





Fakulas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas : Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA

Hari : Sabtu

Tanggal : 31- Agustus- 2019

Tim Penguji

	Nama Jelas	Tanda Tangan	Tanggal
Ketua	: Hari Naredi, M.Pd		23/9/19
Sekretaris	: Andi, M.Pd		25/9/19
Pembimbing 1	: Dr. Desvian Bandarsyah, M.Pd		28/9/19
Pembimbing II	: Hari Naredi, M.Pd		23/9/19
Penguji 1	: Dr. Lelly Qodariah, M.Pd		20/9/19
Penguji II	: Jumardi, M.Pd		19/9/19

Disahkan oleh,

Dekan



Dr. Desvian Bandarsyah, M.Pd

NIDN. 0317126903

## ABSTRAK

**KHOERUDDIN NUR ROCHMAN**, NIM 1501075009. *“Peran Politik Mohammad Hatta dalam Demokrasi Parlementer Pada Tahun 1950-1957”*. Skripsi. Jakarta: Program Studi Pendidikan Sejarah. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, 2019

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang keluarga, pendidikan, dan sosial budaya yang membentuk karakter HAMKA. Kemudian untuk menganalisis lebih dalam peran politik Mohammad Hatta pada saat Demokrasi Parlementer pada tahun 1950 sampai dengan 1957.

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Penelitian Sejarah yang terdiri dari empat langkah, yakni (1) Heuristik merupakan kegiatan mencari sumber untuk mendapatkan data-data sejarah; (2) Kritik (Verifikasi) merupakan kegiatan menyeleksi sumber yang didapatkan; (3) Interpretasi merupakan kegiatan menafsirkan atau menguraikan fakta-fakta sejarah yang didapatkan; (4) Historiografi merupakan tahap terakhir dari metode penelitian sejarah yakni kegiatan penulisan sejarah berdasarkan fakta-fakta sejarah dan penafsiran penulis dalam menyusun penelitian sejarah.

Hasil penelitian ini mengeneralisasi bahwa Mohammad Hatta memiliki karakter dan sikap tegas, mempunyai konsistensi yang tinggi dalam mengambil resiko dalam setiap tindakan yang diambilnya. Hal itu tidak dapat dilepaskan dari perjalanan hidupnya dari masa kanak-kanak sampai dewasa yang mampu membentuk karakter Mohammad Hatta menjadi sosok yang demikian. Hatta bukan hanya seorang Negarawan, Penulis, Ekonom, juga merupakan seorang yang sangat mencintai bangsanya dengan segenap jiwa raga yang dimilikinya. Perjuangan Hatta dengan tidak berjalan mudah bahkan berujung pada pengasingan yang ia terima. Kritik dilakukan Hatta dalam surat kabar termasuk kritik yang Hatta lontarkan kepada Soekarno dan dibukukan dengan judul Demokrasi Kita.

**Kata Kunci:** Peran Politik, Demokrasi Parlementer, Kabinet Hatta, KMB, Perdana Menteri, Dwi Tunggal.

## ABSTRACT

**KHOERUDDIN NUR ROCHMAN**, NIM 1501075009. Mohammad Hatta's politic of Democracy Parliamentary in 1950-1957. Skripsi. Jakarta. History Educational Program Muhammadiyah University Prof. DR. HAMKA. 2019

This research is purposed to acknowledge the family, Educational, culture and social background which construct HAMKA's character. Moreover, to analyze more on Mohammad Hatta's politic of Democracy Parliamentary in 1950-1957

This research used historical research methodology which consist of four processes: (1) Heuristic, is a process for seeking all the history data; (2) Critic (Verification) is a process to elect all the data sources; (3) Interpretation is a process of analyzing all the data from the sources; (4) Historiography is a final process from historical research methodology which writing all the interpreted fact based on the data in completing the history research.

Based on the result of the research, generally Mohammad Hatta has good character and has firm character, highly consistent in taking the risk for achieving all the goals in his life. It was developed since in his childhood which finally developed Mohammad Hatta's character. Hatta is not only a statesman, a writer, an economist but a person who truly loves his country. Hatta's effort was not easy, moreover he was abandoned. Some of the critics were given to Soekarno which written in a book entitled "Demokrasi Kita"

**Key Word:** Politics' function, Democracy Parliamentary, Hatta Cabinet, KMB, Prime Minister, Dwi Tunggal.

## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
ABSTRACT.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	8
C. Batasan Masalah.....	8
D. Rumusan Masalah.....	8
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
1. Tujuan Penelitian.....	9
2. Kegunaan Penelitian.....	10
<b>BAB II KAJIAN TEORIK.....</b>	<b>11</b>
A. Peran Politik.....	11
B. Konsep Negara Federal.....	12
C. Gagasan Demokrasi dan Bentuk Negara Kesatuan di Indonesia.....	14
D. Eksistensi RI Ditinjau dari Konsep Unsur-Unsur Negara.....	19
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....</b>	<b>22</b>
A. Heuristik.....	22
B. Kritik Sumber.....	23
C. Interpretasi.....	23
D. Historiografi.....	24
<b>BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS KRITIS HISTORIS.....</b>	<b>25</b>
A. Latar Belakang Sosial Budaya Mohammad Hatta.....	25
1. Latar Belakang Budaya Minang.....	25
2. Masa Kanak-Kanak dan Remaja.....	31
B. Gagasan Pemikiran Mohammad Hatta.....	44
1. Gagasan Demokrasi.....	44

2. Non Koperasi.....	48
3. Pandangan Nasionalisme.....	54
4. Konsep Ekonomi.....	59
5. Politik Bebas Aktif.....	62
C. Peran Hatta Pada Demokrasi Parlementer.....	66
1. Hatta sebagai Perdana Menteri.....	66
2. Konferensi Meja Bundar.....	70
3. Kabinet Hatta.....	76
4. Demokrasi Parlementer.....	87
5. Berakhirnya Dwi Tunggal.....	95
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>99</b>
A. Simpulan.....	99
B. Saran.....	100
DAFTAR PUSTAKA.....	103
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	108
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	114

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Lebih dari tiga ratus tahun lamanya, Bangsa Indonesia berada dibawah penjajahan Belanda. Pada Awalnya, Belanda menduduki sebagian kecil saja bagian yang diperolehnya sebagai sahabat dari pada salah seorang Raja. Akan tetapi, Sejarah Belanda meminta tanah adalah sejarah menanam kekuasaan di tanah jajahannya. Berangsur-angsur, setapak demi setapak, Belanda berhasil menaklukan seluruh Indonesia. (Hatta, 2000:3)

Pada fase perencanaan negara Indonesia, pada tanggal 15 Juli 1945, Badan penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang bersidang di Pejambon terlibat dalam debat panas mengenai hukum dasar dan Hak Asasi Manusia (Rohayuningsih, 2013:189). Pertanyaan itu muncul haruskah kebebasan-kebebasan demokratis, hak menyatakan pikiran dan pendapat secara lisan dan tertulis, hak berkumpul dan hak berserikat, ditetapkan dalam undang- undang dasar atau tidak? Soekarno dan Supomo dengan gigih menolak, sedangkan Hatta Muhammad Yamin dan tokoh lain mendukung.

Soekarno mendasarkan penolakannya pada dua argumen. Pertama, menyatakan bahwa warga negara secara individual memiliki hak-hak dasar tertentu sama dengan membuka pintu bagi individualisme: "Kita rancangkan UUD dengan kedaulatan rakyat bukan kedaulatan individu".

Kedua, menurut Soekarno rakyat memerlukan keadilan sosial, padahal kebebasan-kebebasan itu tidak dapat mengisi perut orang yang hendak mati kelaparan (Hatta, 2016:147).

Mohammad Hatta pun menolak liberalisme. Tetapi ia mengajukan suatu kekhawatiran yang rupa-rupanya di luar bayangan Soekarno. Hatta khawatir dan melihat jangankan kita memberikan kekuasaan yang tidak terbatas kepada negara untuk menjadikan di atas negara baru itu suatu negara kekuasaan. Dari sinilah Hatta mengkhawatirkan munculnya negara kekuasaan dan Hatta juga tidak mau mempertentangkan keadilan sosial dengan hak-hak demokratis.

Asas yang digunakan Bangsa Indonesia adalah Kedaulatan Rakyat. Menurut Hatta Kedaulatan rakyat berarti kekuasaan untuk mengatur pemerintahan negeri ada pada rakyat. Rakyat berdaulat, berkuasa untuk menentukan cara bagaimana harus diperintah. Tetapi putusan rakyat yang dapat menjadi peraturan pemerintahan bagi orang semuanya ialah keputusan yang ditetapkan dengan cara mufakat dalam satu perundingan yang teratur bentuknya dan jalannya. Bukanlah keputusan yang sekonyong-konyong diambil dengan cara mendadak dalam suatu rapat orang banyak yang tersendiri saja dengan menyerukan bersama-sama mufakat. Disini takkan ada permusyawaratan lebih dahulu, sebab itu bukanlah keputusan menurut kedaulatan rakyat.

Jadi, kedaulatan rakyat adalah kekuasaan yang dijadikan oleh rakyat atau atas nama rakyat di atas dasar *permusyawaratan*. Hal itu juga



tertera pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia pada Pasal 1 ayat 3 (Hatta, 2014:7).

Mohammad Hatta melihat filsafat negara kita yaitu pergerakan arah kebangsaan dan kemerdekaan dahulu cita-cita demokrasi sosial yang menjadi dasar bagi pembentukan Negara Republik Indonesia merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Cita-cita yang dituangkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (Hatta, 2014:283).

Proklamasi kemerdekaan yang dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10.00 dibacakan dimuka rakyat di halaman rumah Soekarno di Pegangsaan Timur No 56. Bangsa Indonesia mendapat respon yang sangat positif dari negara-negara lain seperti: Mesir, Palestina untuk berdaulat atas berdirinya Negara Indonesia.

Pada sore harinya, penanda tangan naskah proklamasi atas nama Bangsa Indonesia yaitu Mohammad Hatta menerima telepon dari Tuan Nishiyama, Pembantu Admiral Tadashi Maeda, Untuk bertemu dengan seorang opsir Kaigun (Angkatan Laut) karena beliau ingin mengemukakan suatu hal yang sangat penting bagi Indonesia. Nishiyama sendiri akan jadi juru bahasanya dan Hatta mempersilahkan datang (Hatta, 2013: 94).

Hal yang penting tersebut merupakan rasa keberatan terhadap bagian kalimat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, ” Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Isi pembukaan tersebut dirasakan oleh wakil umat Protestan dan Katolik tidak mengikat mereka melainkan hanya mengikat rakyat yang

memeluk agama Islam. Akan tetapi, tercantumnya ketentuan seperti itu di dalam suatu dasar yang menjadi pokok Undang-Undang Dasar 1945 memunculkan sikap diskriminasi terhadap golongan minoritas. Jika diskriminasi itu ditetapkan juga, maka mereka lebih suka berdiri di luar Negara Republik Indonesia.

Hatta mengatakan bahwa kata di dalam bunyi Undang-Undang Dasar 1945 tersebut bukan suatu diskriminasi sebab penetapan itu hanya mengenai rakyat yang beragama Islam. Waktu merumuskan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Mr. Marawis yang ikut serta dalam Panitia Sembilan tidak mempunyai keberatan apa-apa pada tanggal 22 Juni 1945 beliau ikut menandatangani.

Lalu argumentasi yang diberikan oleh perwakilan umat Protestan dan Katolik sangatlah serius keesokan paginya, Pada tanggal 18 Agustus 1945, Sebelum Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia memulai agenda rapat, Hatta Mengajak KI Bagus Hadi Koesoemo, Wahid Hasyim, Mr. Kasman Singodimedjo, dan Mr. Teuku Hasan dari Sumatera mengadakan suatu rapat pendahuluan untuk membicarakan masalah tersebut (Hatta, 2013:97).

Sidang tersebut berlangsung selama 15 menit dan hasilnya untuk tidak terjadi perpecahan bangsa, kami mufakat untuk menghilangkan bagian kalimat yang menusuk hati kaum Kristen dan Katolik itu dengan menggantinya dengan “Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Pada hari pertama, tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia selesai mempersoalkan Undang-Undang Dasar 145 seluruhnya dengan mengadakan sedikit perubahan disana-sini yang tidak prinsipil. Pada hari itu juga di waktu sore hari Panitia Persiapan membicarakan struktur negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diterima dan memilih Presiden dan Wakil Presiden. Otto Iskandar Dinata mengusulkan berturut-turut Bung Karno dan Mohammad Hatta untuk memangku jabatan yang tertinggi itu. Kemudian di luar sidang Sukardjo Wirjopranoto mengemukakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden itu harus merupakan satu Dwi-Tunggal. Kontruksi semacam itu adalah unik dalam sejarah, tidak ada contohnya dalam dunia sekarang, akan tetapi menurut pendapatnya adalah suatu keharusan bagi Negara Indonesia di masa itu. (Hatta, 2015: 242).

Rapat hari kedua dipergunakan untuk memilih gubernur tiap-tiap provinsi dan membicarakan berbagai hal yang mengenai organisasi jabatan negara, sekaligus diputuskan pada hari itu, bahwa anggota-anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan selekas-lekasnya pulang ke daerah masing-masing dan melaksanakan tugas yang diberikan kepada mereka. Pada hari itu pula Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) menganggap kerjanya selesai dan membubarkan diri sendiri. Setelah pembubaran PPKI dibentuklah Komite Nasional Indonesia Pusat yang dikemudian dikenal sebagai KNIP.

Di sisi lain, Belanda yang pernah menjajah Indonesia tidak ingin mengakui kemerdekaan tersebut. Mereka masih beranggapan bahwa Indonesia merupakan tanah jajahan mereka setelah Jepang menyerah kepada Sekutu. Hal ini yang membuat Belanda masuk kembali ke wilayah Indonesia dengan membonceng Sekutu.

Pemboncengan Belanda oleh Sekutu menandakan adanya periode baru bagi Indonesia. Usia Indonesia yang merdeka masih seumur jagung mulai menapaki periode yang dinamakan periode Revolusi yang terjadi pada tahun 1945-1949. Jalannya revolusi menggunakan dua cara yakni jalur diplomasi dan cara secara fisik (berperang). Dua cara ini merupakan alat perjuangan bangsa Indonesia dalam menangani Belanda dan Sekutu masuk ke Indonesia.

Dimasa kedatangannya Belanda kembali ke Indonesia terjadi perundingan yang menentukan Indonesia dijajah kembali atau tidaknya, menjadi negara yang merdeka dan sah dimata hukum dunia atau tidak. Adanya upaya perjuangan diplomasi ditempuh Indonesia pada fase periode Revolusi sebagai berikut: Perundingan Roem Royen, Perundingan Linggarjati, Perundingan Renville, Perundingan Konferensi Meja Bundar (KMB). Pada perundingan KMB ini menyatakan bahwa Indonesia mempunyai kedaulatan penuh, tidak termasuk Papua. Kemudian Indonesia berganti sistem pemerintahan menjadi Republik Indonesia Serikat (RIS) dengan negara federal yang bertahan hanya beberapa minggu saja dikarenakan banyak sentimentin pro-Republik di negara-negara federal

yang didirikan oleh Belanda itu. Sentimen itu semakin kuat ketika dibebaskannya 12.000 orang tawanan Republik dari penjara-penjara Belanda antara bulan Agustus sampai Desember 1949. (Ricklefs, 2005: 466).

Jika melihat latar belakang yang sudah dipaparkan diatas, masyarakat Indonesia lebih banyak mengetahui konsep bernegara seperti yang dicetuskan oleh Sukarno, Tan Malaka, Mohammad Yamin. Akan tetapi, sosok Wakil Presiden pertama RI Mohammad Hatta tertutupi karena banyaknya pandangan masyarakat terhadap Hatta ini adalah sebagai bapak koperasi. Jika mendalami lebih jauh, Mohammad Hatta menjelma menjadi bapak Kedaulatan Negara. Sehingga penelitian ini dibuat untuk mengungkap cara Hatta dalam mengarungi dinamika kenegaraan bangsa. Tinjaunnya hampir mirip dengan memoir yang lebih fokus kepada suatu peristiwa yang penting dari tokoh tersebut. Akan tetapi, tetap terdapat ruang bagi peneliti untuk menuliskan kronologi kehidupan Hatta secara singkat, dengan demikian masih ada ruang bagi peneliti untuk melakukan penelitian tentang peran politik Mohammad Hatta pada tahun 1950-1957.

## **B. Identifikasi Masalah**

Bedasarkan latar belakang yang sudah diuraikan diatas, penelitian ini mencoba mencari peran politik Mohammad Hatta dalam sistem demokrasi parlementer di Indonesia pada tahun 1950-1957 dan melihat demokrasi versi Hatta yang mampu menjawab realitas kehidupan masyarakat.

## **C. Batasan Masalah**

Karena adanya keterbatasan peneliti dalam hal waktu, tenaga, materi, serta teori-teori, dan supaya peneliti dapat dilakukan secara lebih mendalam. Dengan adanya keterbatasan tersebut, maka peneliti melakukan pembatasan masalah yakni hanya memilih identifikasi tertentu yang akan diteliti mengenai “Peran politik Mohammad hatta dalam Sistem Demokrasi Parlementer Pada Tahun 1950-1957”. Sehingga tidak semua masalah yang sudah teridentifikasi tersebut mungkin diteliti oleh penulis dengan satu disiplin ilmu tertentu.

## **D. Rumusan Masalah**

Bedasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat diambil suatu identifikasi masalah yang dapat dikaji mengenai penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang keluarga, pendidikan, dan sosial budaya yang membentuk karakter Mohammad Hatta?

2. Bagaimana proses terbentuknya gagasan pemikiran kebangsaan Mohammad Hatta?
3. Bagaimana peran Mohammad Hatta pada perundingan Konferensi Meja Bundar (KMB)?
4. Bagaimana peran politik Mohammad Hatta pada masa Demokrasi Parlementer tahun 1950-1957.?
5. Bagaimana proses mundurnya Mohammad Hatta dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia?

#### **E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

##### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk membahas lebih dalam proses yang membentuk karakter Mohammad Hatta..
- b. Untuk membahas lebih dalam proses gagasan pemikiran Mohammad Hatta
- c. Untuk membahas lebih dalam mengenai peran Mohammad Hatta pada Konferensi Meja Bundar (KMB)
- d. Untuk membahas lebih dalam Demokrasi Parlementer pada rentan waktu 1950-1957.
- e. Untuk menganalisis kemunduran diri Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia merupakan bentuk demokrasi yang tidak sesuai cita-cita bangsa.

## 2. Kegunaan Penelitian

### a. Pemerintah

Memberikan gambaran kepada pemerintah untuk tidak melupakan sejarah bangsanya sendiri melalui tulisan seputar Mohammad Hatta dalam pandangannya tentang konsep negara dan kedaulatan rakyat

### b. Masyarakat

Memberikan informasi kepada masyarakat seputar Mohammad Hatta sebagai bapak kedaulatan rakyat.

### c. Mahasiswa

Memberikan informasi kepada mahasiswa pada umumnya seputar peran politik Mohammad Hatta yang masih terdengar asing konsep bernegaranya dan mahasiswa yang berkaitan dengan sejarah pada khususnya mengenai kedaulatan rakyat

### d. Peneliti

Menjadikan bahan rujukan kepada peneliti berikutnya mengenai sejarah Indonesia, khususnya seputar Mohammad Hatta



## DAFTAR PUSTAKA

### Arsip

Arsip Nasional Republik Indonesia PNI Baru 1932.

Arsip Nasional Republik Indonesia Badan Pekerja Komite Nasional Pusat 1945-1950.

Arsip Nasional Republik Indonesia Daftar Foto Personal.

### Buku

Abdullah, Taufik. 1998. *Karya Lengkap Bung Hatta Buku I Kebangsaan dan Kerakyatan*. Jakarta: LP3ES.

Abdullah, Taufik. 2000. *Karya Lengkap Bung Hatta Buku II Kemerdekaan dan Demokrasi*. Jakarta: LP3ES.

Abdullah, Taufik. 2000. *Karya Lengkap Bung Hatta Buku II Perdamaian Dunia dan Keadilan Sosial*. Jakarta: LP3ES.

Abdullah, Taufik dan A.B. Lopian (ed). 2012. *Indonesia dalam Arus Sejarah Jilid 7: Pasca Revolusi*. Ihtiar Baru Van Hoeve

Anggota IKAPI. 1988. *Mohammad Hatta Mendayung Antara Dua Karang*. Jakarta: Bulan Bintang.

Anggota IKAPI. 2017. *UUD 1945 & Amandemennya untuk Pelajar dan Umum*. Jakarta: Buku Tim Grasindo.

Bandarsyah, Desvian. 2015. *Titipan Sejarah: Mengenang Kiprah Prof. Dr. Wr. Hendra Saputra, M.Hum*. Jakarta: UHAMKA Press.

Budiharjo, Miriam, 2010. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia.

Burke, Peter. 2015. *Sejarah dan Teori Sosial: Edisi Kedua*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Hatta, Meutia Farida. 1980. *Bung Hatta Pribadinya dalam Kenangan*. Jakarta: Sinar Harapan.

Hatta, Mohammad. 2000. *Karya Lengkap Bung Hatta: Kemerdekaan dan Demokrasi*. Jakarta: LP3S.

Hatta, Mohammad. 2015. *Mohammad Hatta, Politik, Kebangsaan, dan Ekonomi*. Jakarta: Kompas,

Hatta, Mohammad. 2013. *Untuk Negeriku: Menuju Gerbang Kemerdekaan, Sebuah Otobiografi Jilid 1 Bukit Tinggi Rotterdam Lewat Betawi* Jakarta: Kompas.

- Hatta, Mohammad. 2013. *Untuk Negeriku: Menuju Gerbang Kemerdekaan, Sebuah Otobiografi Jilid II Berjuang dan Dibuang*. Jakarta:Kompas.
- Hatta, Mohammad. 2013. *Untuk Negeriku: Menuju Gerbang Kemerdekaan, Sebuah Otobiografi Jilid III Menuju Gerbang Kemerdekaan*. Jakarta:Kompas.
- Hatta, Mohammad. 2014. *Demokrasi Kita*. Bandung: Sega Arsy.
- Hatta, Mohammad. 2014. *Kedaulatan Rakyat Otonomi dan Demokrasi*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Hatta, Seri Buku Tempo. 2016. *Hatta Jejak Yang Melampui Zaman*. Jakarta: Gramedia.
- Isiwara, F. 1980. *Pengantar Ilmu Politik*. Jakarta: Binacipta,
- Kartodirjo, Sartono. 1993. *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kahin, George M.T. 2013. *Nasionalisme dan Revolusi Indonesia*. Jakarta; Komunitas Bambu
- Kuntowijoyo. 2013. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Muhibuddin, Muhammad. 2019. *Bung Hatta Kisah Hidup dan Pemikiran Sang Arsitek Kemerdekaan*. Yogyakarta: Araska
- Noer, Delia. 1980. *Mohammad Hatta Biografi Politik*. LP3ES: Jakarta
- Noer, Delia. 2018. *Biografi Politik Jilid I Mohammad Hatta dan Pemikirannya*. Jakarta: Kompas.
- Noer, Delia. 2018. *Biografi Politik Jilid II Mohammad Hatta dan Persatuan Indonesia*. Jakarta: Kompas.
- Priyatna, Haris. 2015. *Bunga-Bunga di Taman Hati Soekarno Kisah Cinta Bung Karno dan 9 Istrinya*. Tangerang: Literati.
- Ricklefs, M.C. 2005. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*. Jakarta: Serambi.
- Riyanto, Armada. 2017. *Berfilsafat Politik*. Yogyakarta: PT Kanisius.
- Rose. Mavis. 1990. *Indonesia Merdeka Biografi Politik Mohammad Hatta*. Jakarta: PT Gramedia Utama.
- Sobary, Mohammad. 1996. *Kebudayaan Rakyat Dimensi Politik dan Agama*. Yogyakarta; Bentang Budaya.

Sulasman. 2014. *Metodologi Penelitian Sejarah: Teori, Metode, dan Contoh Aplikasi*. Bandung: Pustaka Setia

Susanto, Nugroho. Dkk. 2011. *Sejarah Nasional Indonesia Jilid V Zaman Kebangkitan Nasional dan Masa Hindia Belanda*. Jakarta; Balai Pustaka.

Susanto, Nugroho. Dkk. 2011. *Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI Zaman Jepang Hingga Zaman Republik*. Jakarta; Balai Pustaka.

Suseno, Franz Magnis, 2003. *Etika Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Swasono, Edi Sri, 2002. *Bung Hatta Bapak Kedaulatan Rakyat Memperingati Satu Abad Bung Hatta*. Bogor: Yayasan Hatta.

Wicaksana, Anom Whani. 2018. *Mohammad Hatta Hidup Jujur dan Sederhana Untuk Indonesia*. Jakarta: C-Klik Media.

#### **Modul.**

Dwi, Dkk. 2012. *Demokrasi. Bahan Ajar*. Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan.

Soliha, Ratnia, Dkk. 2014. *Pengantar Ilmu Pemerintahan. IPEM 4111/Modul 1*.

Hanafie Haniah. 2011. *Politik Indonesia*. Jakarta, UIN Jakarta, E-Book.

#### **Jurnal**

Aman. 2012. *Pemikiran Hatta tentang Demokrasi, Kebangsaan dan Hak Azasi Manusia*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, E- Journal Pendidikan Sejarah B-3.

Aman. Zainal, Dkk. 2013. *Indonesian Journal Of Social and Cultural Anthropology*. Jakarta. Antropologi Indonesia Volume 34 No. 12.

Atiqoh. 2016. *Perhimpunan Indonesia Sebagai Organisasi Pergerakan Indonesia yang Revolusioner (1922-1930)*. Yogyakarta. Universitas Negeri Yogyakarta. Volume 2 No. 6.

Kasirun, dkk. 2018. *Peranan Mohammad Hatta Pada Masa Pemerintahan Parlementer 1948-1956*. Bandar Lampung: UNILA, E-Journal Pendidikan Sejarah. Vol. 6 No.1

Saifuddin. 2013. *Lahirnya UUD 45: Sebuah Tinjauan Historis Penyusunan dan Penetapan UUD 1945*. UNISIA, E Journal. No 49 Volume XXVI

Setiyarini, Herlina. 2014. *Pemikiran Mohammad Hatta Tentang ekonomi Koperasi Tahun 1925-1953*. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya, e-Jurnal Pendidikan Sejarah Volume 2. No 3.

Setyo, Putro. 2018. *Konferensi Inter-Indonesia Tahun 1949: Wujud Konsensus Nasional Antara Republik Indonesia dengan Bijeenkomst Federaal Overleg*. e-journal Sejarah Citra Leka Volume 3 No. 1

#### **Makalah**

Ervana, Linda. 2013. Gagasan Mohammad Hatta dalam Politik Bebas Aktif.

*Makalah*. Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

Parmudi, Mochammad. 2017. Perilaku Politik Bung Hatta. *Makalah*. UIN

Walisongo. Semarang

#### **Seminar**

Faiz, Fahrudin. 2017. Mohammad Hatta Tokoh Nasional. *Seminar*. Masjid

Jendral Sudirman Yogyakarta.

#### **Skripsi**

Absor, Fajar. 2016. Mr, Assaat Datuk Mundo dan Eksistensi Republik Indonesia Pada Masa Republik Indonesia Serikat tahun 1949-1950. *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah. Prof. DR. HAMKA

Prihartanti, Bernanda. 2010. Peranan Sutan Sjahrir dalam Pemerintahan Indonesia (1945-1947). *Skripsi*. Universitas Sanata Dharma.

Ruslan, Ahmad. 2017. Sikap Politik HAMKA dalam Merespon Kebijakan Politik Orde Lama. *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

Santi, Sri. 2016. Gagasan Kedaulatan Rakyat Menurut Mohammad Hatta. *Skripsi*.

IAIN Sultan Maulana Hasunuddin.

#### **Internet**

<https://tirto.id/sukarno-hatta-dwitunggal-yang-tanggal-cAy6>

<https://nasional.kompas.com/jeo/asal-usul-indonesia-dari-catatan-bung-hatta-sampai-peran-stovia>